Determinan Belanja Modal Pada Kab/Kota Di Provinsi Banten

Dwina Hermaningtyas¹ Dwina4htys@gmail.com

Wawan Ichwanudin² ichwan0308@untirta.ac.id

Enis Khaerunnisa³

eniskh@untirta.ac.id

123Uiversitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belanja modal, dalam penelitian ini faktor yang digunakan yaitu pengaruh pendapatan asli daearah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang terdapat di Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2011-2017. Populasi yang digunakan dalam dipenelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Badan Pusat Statistik periode tahun 2011-2017. Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 4 Kabupaten dan 4 Kota daari keseluruhan populasi.

Metode yang digunakan adalah asosiatif kausal dan data yang digunakan adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Search*), yaitu dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari media, seperti jurnal, *website* dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian yang didapat menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, (2) Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, (3) Dana alokasi khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal, (4) Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil

ABSTRACT

This study aims to find out what factors influence capital expenditure. In this research, the factors used are the influence of local original revenue, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds found in regencies / cities in Banten Province which are registered. in the Central Statistics Agency (BPS) for the period 2011-2017. The population used in this study are all regencies / cities included in the Central Statistics Agency for the period 2011-2017. The sample in this study is to use 4 districts and 4 cities of the entire population.

The method used is causal associative and the data used is secondary data. The data collection technique used is library research (Library Search), which is data collection techniques obtained by researchers from the media, such as journals, websites and other sources.

The results of the research show that: (1) Local Original Revenue has a significant positive effect on capital expenditure, (2) General allocation funds have a positive effect on capital expenditur, (3) Special allocation funds have a positive but not significant effect on capital expenditure, (4) Profit sharing Funds have a positive effect on capital expenditure.

Keywords: Local Original Revenue; General Allocation Funds; Special Allocation Funds; Profit Sharing Funds

PENDAHULUAN

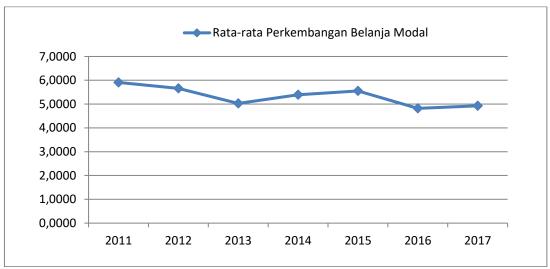
Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan mengenai diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kebijakan dalam melaksanakan kewajiban daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan diberi sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah guna untuk perkembangan daerah dalam memajukan kehidupan masyarakat daerah serta meningkatkan pelayanan yang baik, serta pembangunan sarana dan prasarana. Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunaka dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangnan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Dalam pemahamannya Belanja Modal berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan sebaik mungkin yang diberikan kepada masyarakat.

Asas desentralisasi didasarkan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan untuk pembiayaan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Umum adalah dana transferan yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan antar daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan guna mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Salah satu tujuan penting Pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Halim,2014: 118). Besaran DAU ditetapkan kurang lebih sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus yang tertera pada UU No. 33 tahun 2004 DAK adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat yang secara khusus merupakan kebutuhan yang sama dengan program nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya dapat berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. DAK bertujuan untuk membiayai keperluan dasar yang merupakan kegiatan program nasional. Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena

akan lebih cenderung digunakan untuk menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Rini,2011).

Dana Bagi Hasil adalah dana berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai pengeluaran operasional dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah agar dapat memperbaiki keseimbangan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi yang berasal dari daerah penghasil.



Sumber Data: BPS (diolah Peneliti)

Grafik 1.1 Rata-rata Perkembangan Belanja Modal Tahunan untuk Kab/Kota di Provinsi Banten

Berdasarkan grafik 1.1, menunjukkan pengeluaran Belanja Modal selama tujuh tahun. Hasil perhitungan mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Dari perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup rendah, tetapi pada tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan yang jumlahnya tidak jauh dari tahun yang sebelumnya. Penurunan belanja modal sangat berdampak pada masyarakat karena dengan menurunnya belanja modal maka masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemerintah dari biaya belanja modal. Dari fenomena diatas, terdapat peningkatan dan penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam belanja modal ini akan menggunakan empat faktor yang memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap belanja modal, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gounder *et al.* (2007) dan Abba (2015) menemukan PAD positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut V Sebastiana dan Cahyo (2016), Nurlis (2016) bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016), Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) dan Pentury (2011) menemukan DAU positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Purbarini dan Masjojo (2015) dan Nurlis (2016) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011), Oktora dan Pontoh (2013) menyimpulkan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Agus Budi dan Mohamad Ainur (2013) mengemukakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel bebas yang menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal. Maka dari itu penelitian ini menambahkan satu variabel independen yang digunakan yaitu variabel Dana Bagi Hasil (DBH). Karena Dana Bagi Hasil merupakan salah satu variabel dana yang digunakan dalam belanja modal. Selain itu didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Arbie Gugus Wandira (2013) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan atau teori agensi yaitu menjelaskan mengenai hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Dalam sektor publik hubungan keagenen yang ada diantaranya hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah atau hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat sebagai principal untuk menjalankan pemerintahan nya. Menurut Jensen and Meckling (1976) penelitian Desak Gede, Putu Kepramareni, Ni Luh (2017) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah

PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu untuk terus ditingkatkan supaya dapat menanggung belanja daerah untuk penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan setiap tahun terus meningkat.

Pembangunan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup masyarakat, rencana pembangunan di daerah baik kabupaten/kota harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna tercapai kemandirian daerah dan keseahteraan yang merata diseluruh daerah. Sumber PAD meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebagian dari dana nya di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dialokasikan ke setiap daerah untuk pelaksanaan desentralisasi yang memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan daerah yang digunakan untuk kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah. Salah satu tujuan penting Pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Halim, 2014).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yaitu bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat secara khusus diberikan untuk mendanai keperluan daerah yang bersifat khusus yang merupakan kebutuhan seragam dengan program nasional. Penggunaan anggaran DAK ditunjukkan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013:43)

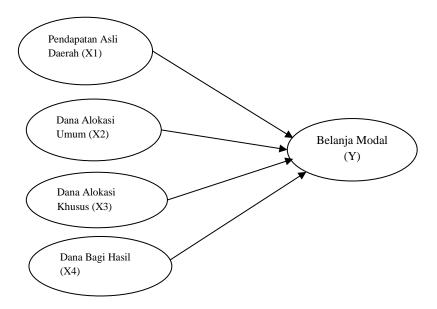
Dana Bagi Hasil

UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi. Dalam pasal 11 UU No.33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu kegiatan yang berupa pengeluaran yang diperlukan mendanai infrastruktur (Henley, 1990:56). Untuk memanfaatkan aset tetap yang dihasilkan, terdapat pelayanan publik dan infrastruktur lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bersinggungan secara langsung. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belana Modal Fisik Lainnya.

Berdasarkan konsep-konsep diatas, mka dapat dijelaskan penelitian ini melalui kerangka pemikiran pada gambar 1



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2011 sampai dengan 2017. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, maka seluruh populasi penelitian ini adalah sebanyak 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten. Karena jumlah Kabupaten/Kota dalam populasi dirasa cukup untuk dilakukannya penelitian, seluruh populasi akan diteliti tanpa menarik sampel dari populasi. Jadi, untuk sampel peneliti menggunakan keseluruhan dari populasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur hasil penelitian adalah regresi berganda dengan regresi *stepwise*. Analisis statistik yang dilakukan meliputi analisis statistika deskriptif, pengujian asumsi klasik deskriptif, pengujian asumsi klasik yang terdiri dari, uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji linearitas, dan uji parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menormalkan data, peneliti melalukan uji Logaritma Natural (LN) dan melalukan pembuangan data (outlier) . Berikut ini hasil uji normalitas setelah menggunakan outlier, data yang di outlier subjek nomor 18,10,12,8,9,24,11,48,49,41,20,25,14,10,12,11. Uji normalitas terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan dana bagi hasil menggunakan parameter kolmogrov smirnov test menghasilkan hasil uji belanja modal, pendapatan asli daerah,dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil berdistribusi

normal karena memiliki Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,175 yang berarti data pada tabel 4.1 tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30470338
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.070
	Negative	118
Test Statistic	_	.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175°

a. Test distribution is Normal.

(Sumber: hasil Output SPSS, data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 4.2, tidak ada korelasi antar variabel yang lebih besar dari pada 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel. Dapat dikatan bahwa variabel independen dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Karena nilai tolerance tidak ada yang lebih besar dari pada 1. Dan tidak ada nilai Varian Inflation Factor (VIF).

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

	Unstandardize Coefficients			Standardized Coefficients			Colline Statis	,
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	1,204	3,466		,347	,730		
	Ln_PAD	,425	,058	,724	7,378	,000	,545	1,835
	Ln_DAU	,320	,190	,151	1,687	,101	,657	1,522
	Ln_DAK	-,007	,095	-,007	-,076	,940	,654	1,529
	Ln_DBH	,211	,112	,178	1,880	,068	,585	1,708

a. Dependent Variable: Ln BM

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level Sig > a (0,05) yaitu 0,060 untuk variabel Ln_ln_PAD, 0,150 untuk variabel Ln_ln_DAU, 0,883 untuk variabel Ln_ln_DAK dan 0,297 untuk variabel Ln_ln_DBH , sehingga penelitian ini bebas dari Heteroskedastitsitas dan layak untuk diteliti. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 : 139).

b. Calculated from data.

Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing masing variabel independent terhadap absolut residunya. Jika nilai probabilitas $>\alpha$ (0,05), thitung < t-tabel, atau sig-t $>\alpha$ (0,05) dipastikan model untuk terjadi heteroskedastisitas. Dari analisis data regresi yang diperoleh hasil bahwa dalam model tabel 4.3 tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,533	,305		1,747	,089
	Ln_In_PAD	,065	,033	,417	1,946	,060
	Ln_ln_DAU	-,167	,113	-,285	-1,472	,150
	Ln_ln_DAK	-,008	,051	-,029	-,148	,883,
	Ln_ln_DBH	-,065	,062	-,219	-1,058	,297

a. Dependent Variable: Abresid2

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Hasil pengolahan data menghasilkan nilai durbin Watson (DW) sebesar 1.759 dengan jumlah variabel bebas sebesar 4 dan taraf nyata sebesar 5%. Maka didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,2848 dengan batas atas (du) sebesar 1.7209. Hasil uji Durbin Watson statistik didapat sebesar 1,1.759 berada di area du < dw < 4—du $(1,7209 \le 1,759 \le 2,279)$, atau berada di area tidak ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.4 tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model Summary^b

						Change Statistics				
		R		Std. Error		F				
Mod		Squar	Adjusted	of the	R Square	Chang			Sig. F	Durbin-
el	R	е	R Square	Estimate	Change	е	df1	df2	Change	Watson
1	.865ª	.748	.719	.01306	.748	25.273	4	34	.000	1.759

a. Predictors: (Constant), Lag_DBH, Lag_DAU, Lag_DAK, Lag_PAD

b. Dependent Variable: Lag_BM

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Berdasarkan nilai perhitungan diatas menghasilkan nilai C^2 hitung sebesar 0 sedangkan C^2 tabel dengan *degree of fredom* (df) = (n-k) = 40 dan jumlah parameter 4 adalah 50,9985. Jadi C^2 hitung (0) < C^2 tabel (50,9985), maka model regresi berbentuk linear.

Tabel 4.5 Tabel Autokorelasi

Model Summary

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	,009a	,000	-,118	,01306436

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Model regresi dengan metode *backward* merupakan salah satu pendekatan dari regresi *stepwise*, regresi *backward* didapatkan dengan cara memasukkan semua variabel kemudian mengeleminasi satu per satu variabel bebas yang tidak signifikan dan dilakukan secara terus menerus sampai tersisa variabel yang signifikan dan dilakukan secara terus menerus sampai tersisa variabel yang signifikan saja dari model regresi yang terbentuk. Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 analisis regresi dengan metode backward diatas variabel yang di keluarkan yaitu Dana Alokasi Khusus sesuai yang tertera pada tabel *exclude variables* dan yang layak dimasukkan dalam model regresi adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

Tabel 4.5 Uji Regresi Stepwise

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	050	.339		146	.885
	Lag_PAD	.400	.054	.708	7.370	.000
	Lag_DAU	.420	.216	.180	1.944	.060
	Lag_DAK	.068	.073	.084	.924	.362
	Lag_DBH	.146	.081	.171	1.797	.081
2	(Constant)	050	.338		148	.883
	Lag_PAD	.403	.054	.712	7.443	.000
	Lag_DAU	.469	.209	.201	2.247	.031
	Lag_DBH	.161	.080	.188	2.013	.052

a. Dependent Variable: Lag_BM

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Tabel 4.6 Exclude Variables

Excluded Variables^a

						Collinearity
					Partial	Statistics
Model		Beta In	Т	Sig.	Correlation	Tolerance
2	Lag_DAK	.084b	.924	.362	.157	.887

a. Dependent Variable: Lag_BM

(Sumber: Output SPSS 22.0 data diolah)

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Pertama

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pada tabel 4.5 pengaruh pendapatan asli daerah (X1) terhadap belanja modal (Y). Dari olahan data diperoleh nilai t hitung = 7,443 < t tabel 1,688298 pada sig 0,000 < 0,05, artinya pengaruhnya positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) dan kesimpulannya adalah **hipotesis 1 diterima.**

Uji Hipotesis Kedua

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pada tabel 4.5 pengaruh dana alokasi umum (X2) terhadap belanja modal (Y). Dari olahan data diperoleh nilai t hitung = 2,247 < t tabel 1,688298 pada sig 0,031 < 0,05, artinya pengaruhnya positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) dan kesimpulannya adalah **hipotesis 2 diterima.**

Uji Hipotesis Ketiga

*H*₃ = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pada tabel 4.5 pengaruh dana alokasi khusus (X3) terhadap belanja modal (Y). Dari olahan data diperoleh nilai t hitung = 0,924 < t tabel 1,688298 pada sig 0,362 < 0,05, artinya pengaruhnya positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Y) dan kesimpulannya adalah **hipotesis 3 ditolak**.

Uji Hipotesis Keempat

H₄ = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap BelanjaModal

Pada tabel 4.5 pengaruh dana bagi hasil (X4) terhadap belanja modal (Y). Dari olahan data diperoleh nilai t hitung = 2,013 < t tabel 1,688298 pada sig 0,052 < 0,05, artinya pengaruhnya positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y) dan kesimpulannya adalah **hipotesis 4 diterima.**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan PAD berpengaruh positif terhadap BM. Pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu darah meningkat maka akan meningkatkan belanja modal. Maka, dapat memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan penyediaan dalam fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasana paling utama di pembangunan infrastruktur dan akan meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya dikarenakan masyarakat telah

memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pembayaran pajak, retribusi,dan lain-lain.

Penelitian ini memperkuat penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Purbani *and* Masjojo (2015) dan Tuasikal (2008).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan DAU berpengaruh positif terhadap BM. Pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten masih sangat membutuhkan DAU utuk penambahan aset lainnya yang memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun dan sebagai sumber dana untuk belanja modal yang diperuntukan membiayai pembangunan daerah. Semakin besar nilai DAU yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota maka akan menambah belanja modal.

Penelitian ini memperkuat penelitian Sumarni (2008) dan Putro (2011) menyimpulkan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM)

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap BM. Pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa DAK tidak mampu dalam meningkatkan belanja modal karena Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Modal dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana.

Seharusnya Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat untuk diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah yang telah sesuai dengan kebijakan dan program nasional dapat meningkatkan sarana dan prasarana bahkan fasilitas publik melalui Belanja Modal.

Penelitian ini memperkuat penelitian Paramartha dan Budiasih (2016), Novianto dan Hanafiah (2015) dan Martini, dkk (2014).

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM)

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan DBH berpengaruh positif terhadap BM. Pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan yang memenuhi belanja modal. Dari hasil tersebut memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal dipengaruhi dari penerimaan sumber DBH. Dengan adanya pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dari proporsi tertentu yang berdasarkan atas daerah penghasil. Penelitian ini memperkuat penelitian Firnandi Heliyanto & Nur Handayani (2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- PAD yang meningkat dapat memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan penyediaan dalam fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasana paling utama di pembangunan infrastruktur dan akan meningkatkan kemandirian daerah.
- Adanya pengaruh positif DAU diperuntukan untuk pemerataan keuangan guna membiayai kebutuhan daerah berupa bantuan yang dikirimkan dari nasional yang digunakan oleh pemda untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah yang kaitannya dengan pembangunan infrastruktur daerah melalui belanja daerah terutama belanja modal
- 3. Tidak adanya pengaruh DAK karena tidak mampu dalam meningkatkan belanja modal karena Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Modal dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana.
- 4. Dan dengan nilai sig. < 0,05 (0,052 > 0,05). Adanya pengaruh positif DBH merupakan sumber pendapatan yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan yang memenuhi belanja modal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada sebelumnya, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

- Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu. Maka, sebaiknya penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahun terkini dan periode penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih banyak serta data lebih lengkap dan relevan.
- 2) Diharapkan dapat menggunakan penambahan variabel baru dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti luas wilayah, pertumbuhan ekonomi, SiLPA dan belanja pemeliharaan, supaya hasil penelitian yang didapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, M. D., & Maryono. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/ Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi). *Prosiding SENDI_U*, ISBN: 978-979-3649-99-3.

- Ant. 2014, 06 16. *BPK Temukan 40 Permasalahan Laporan Keuangan Banten*. Retrieved 10 24, 2019, from news.okezone.com: ttps://news.okezone.com/read/2014/06/16/340/999678/bpk-temukan-40-permasalahan-laporan-keuangan-banten
- Aulia, N. A. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid* 2, 203-214.
- Dalail, Ahmad., Sukidin, Hartanto, Wiwin. 2020. Pengaruh Pendapatan Asali Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.14 NO.1,ISSN:1907-9990.*
- Desak, G., Putu, K., & Ni, L. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1*, ISSN: 2301-8879.
- Ferdinand, Augusty. 2014 Metode Penelitiann Manajemen Pedoman Penelitian Untuk Penilisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi, 14(1)*, 44-52.
- Ghazali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23.*Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hustianto, Sudarwadi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan DAna ALokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papa BArat Tahun 2007-2014). *SNEMA*, ISBN: 978-602-17129-5-5.
- Ichwanudin, Wawan ., Akhmadi,. Setya. A. Yanto. 2014.Modul Praktikum Alat Analisis Statistik. Serang: Laboratorium Studi Manajemen.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. S. 2018. Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(3), 1255-1281.
- Latief. 2014, 07 23. Pembangunan Timpang, Insfrastruktur Banten Memang Buruk!. Retrieved 10 24, 2019, from amp.kompas.com: https://amp.kompas.com/properti/read/2014/07/23/1552037/Pembangunan.Timpang.infrastukt ur.Banten.Memang.Buruk.
- Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS.

- Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rifai, A. R. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. e *Jurnal Katalogis*. *5*(7), 169-180.
- Sani, N. P., & Made, J. A. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud Vol* 7 *No* 3 , 1255-1281.
- Sudrajat, M. A. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belana Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi- FEB, UNIPMA 1(1)*, 56-66.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Wandira, G. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2(1), 2252-6765.
- Yudia Sari, D. M., & Wirama, G. D. 2018. Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 22(3), 2065-2087.
- Zelmiyanti, R. 2016. Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK.Vol.7 No.1*, 11-21.

290